

PJKN - PENYELENGGARAAN - UNIVERSAL HEALTH COVERAGE

2025

PERBUP NO. 16, BD 2025, 12 HLM..

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN TENTANG PENYELENGGARAAN UNIVERSAL HEALTH COVERAGE DALAM PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

ABSTRAK

- : - Peraturan Bupati ini ditetapkan dalam rangka menjamin pemenuhan hak setiap penduduk atas pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau serta mendukung pelaksanaan Universal Health Coverage melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Pekalongan. Peraturan Bupati ini mengatur penyelenggaraan Universal Health Coverage dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional di Daerah.
- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023;
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai maksud dan tujuan penyelenggaraan Universal Health Coverage, penyelenggara dan pemberi jaminan kesehatan, kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional, mekanisme pendaftaran dan perubahan kepesertaan, pelayanan kesehatan, pembayaran iuran, peran serta masyarakat, pembinaan dan pengawasan, serta pendanaan. Peraturan Bupati ini bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, memperluas akses pelayanan kesehatan, dan menjamin keberlangsungan Universal Health Coverage secara berkelanjutan di Kabupaten Pekalongan.

CATATAN

- : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 9 Juli 2025.
- Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 6 Tahun 2020 dan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 63 Tahun 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.